



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 24 /DPR RI/I/2025-2026

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2026**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *juncto* Pasal 66 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 *juncto* Pasal 40 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026;
- b. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 18 September 2025 telah menyetujui Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026 untuk ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberiukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 126);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-5 tanggal 23 September 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2026.**

PERTAMA : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Ketua Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat;
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Para Deputi, Inspektur Utama, dan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal DPR RI;

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 September 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 24 /DPR RI/I/2025-2026
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025

DAFTAR
 PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2026

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.	DPR (KOMISI I)	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR (KOMISI II)	
3.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	DPR (KOMISI II)	
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR (KOMISI III)	
6.	RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)	DPR (KOMISI III)	
7.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR (KOMISI III)	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
8.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR (KOMISI IV)	
9.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR (KOMISI IV)	
10.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR (KOMISI V)	
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	
12.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR (KOMISI VI)	
13.	RUU tentang Kawasan Industri	DPR (KOMISI VII)	
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR (KOMISI VIII)	
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR (KOMISI VIII)	
16.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR (KOMISI IX)	
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR (KOMISI X)	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
18.	RUU tentang Keuangan Negara	DPR (KOMISI XI)	(<i>Omnibus Law</i>)
19.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR (KOMISI XII)	<i>Operan (Carry Over)</i>
20.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR (KOMISI XIII)	
21.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	
22.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR (BADAN LEGISLASI)	
23.	RUU tentang Pertekstilan	DPR (BADAN LEGISLASI)	
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	
25.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	
26.	RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional	DPR (BADAN LEGISLASI)	
27.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR (BADAN LEGISLASI)	
28.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BADAN LEGISLASI)	
29.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri	(BADAN LEGISLASI)	
30.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR (BADAN LEGISLASI)/ DPD	
31.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPR (BADAN LEGISLASI) / DPD	
32.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	
33.	RUU tentang Satu Data Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	
34.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR (BADAN LEGISLASI)	
35.	RUU tentang Transportasi <i>Online</i>	DPR (BADAN LEGISLASI)	
36.	RUU tentang <i>Patriot Bond</i> / RUU tentang Surat Berharga	DPR (BADAN LEGISLASI)	
37.	RUU tentang Daya Anagata Nusantara	DPR (BADAN LEGISLASI)	
38.	RUU tentang Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG	DPR (BADAN LEGISLASI)	
39.	RUU tentang Pelelangan Aset	DPR (BADAN LEGISLASI)	
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	(BANDAN LEGISLASI)	
41.	RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (dalam Prolegnas 2025-2029 berjuluk RUU tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Hewan)	DPR (BANDAN LEGISLASI)	
42.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
43.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR (ANGGOTA)	
44.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
45.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR (ANGGOTA) / DPD	
46.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR (ANGGOTA)	
47.	RUU tentang Komoditas Khas	DPR (ANGGOTA)	
48.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR (ANGGOTA)	
49.	RUU tentang Bank Makanan	DPR (ANGGOTA)	
50.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	
51.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
52.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
53.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
54.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	PEMERINTAH	
55.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	PEMERINTAH	
56.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
57.	RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)	PEMERINTAH	
58.	RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah	PEMERINTAH	
59.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH	
60.	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	
61.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	PEMERINTAH	
62.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	PEMERINTAH	
64.	RUU tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
65.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	PEMERINTAH	
66.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH	
67.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (<i>Carry over</i>); dan RUU lainnya.
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

